

ABSTRAK

Eka Widawati, Akuntabilitas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya (Studi di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro). Di bawah bimbingan Muhammad Asim Asy'ari, S.E., M.Ak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan setiap desa untuk mendirikan BUMDes. Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam pengelolaannya banyak permasalahan yang terjadi, sehingga pendirian BUMDes masih banyak yang berhenti ditengah jalan. Untuk itu perlu dilakukan akuntabilitas BUMDes berguna untuk menjaga keberlangsungan hidup BUMDes.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menemukan bahwa BUMDes Karya Mulya sudah bisa dikatakan akuntabel dalam dimensi akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan belum memenuhi akuntabel dalam dimensi akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas kebijakan. Ketidak akuntabelan dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikarenakan adanya penyalahgunaan jabatan, yaitu adanya rangkap jabatan ketua BUMDes yang juga sebagai Perangkat Desa Kaur Perencanaan Desa Rendeng. kegiatan operasional BUMDes tidak berjalan sesuai dengan AD/ART, sehingga pelaksanaannya belum bisa dikatakan akuntabel menurut dimensi akuntabilitas manajerial. Sedangkan ketidak akuntabelan dalam dimensi akuntabilitas kebijakan dikarenakan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kegiatan operasional BUMDes belum bisa dilakukan secara tepat.

Kata Kunci: BUMDes, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Finansial.

ABSTRACT

Eka Widawati, Accountability for the Village Owned Enterprises of Karya Mulya (Study in Rendeng Village, Malo District, Bojonegoro Regency). Under the guidance of Muhammad Asim Asy'ari, SE, M.Ak.

Law No. 6 of 2014 has mandated every village to establish a village owned enterprises. Furthermore, related to the management of village owned enterprises, it is regulated in detail in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Underdeveloped Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 concerning the establishment, management and management, and dissolution of Village Owned Enterprises. In its management there are many problems that occur, so that the establishment of many village owned enterprises still stops in the middle of the road. For this reason, it is necessary to have accountability for the village owned enterprises useful for maintaining the survival of village owned enterprises.

This study aims to find out how the accountability of the Karya Mulya village owned enterprises. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Research site in Rendeng Village, Malo District, Bojonegoro Regency. The results of the study found that the Karya Mulya village-owned enterprises could be said to be accountable in the dimensions of legal accountability, program accountability, and financial accountability. Whereas it has not fulfilled accountability in the dimensions of honesty accountability, managerial accountability, and policy accountability. Accountability in the dimension of honesty accountability is due to abuse of office, namely the existence of multiple positions of chairperson of a village-owned business entity which is also a Village Tool for the Planning of Rendeng Village Planning. The operational activities of village-owned enterprises do not run in accordance with the Articles of Association / Bylaws, so their implementation cannot be said to be accountable according to the dimensions of managerial accountability. Whereas the unaccountability in the dimension of policy accountability is because the policies taken in carrying out operational activities of village-owned enterprises cannot yet be carried out appropriately.

Keywords: Village owned enterprises, Legal and Honesty Accountability, Program Accountability, Managerial Accountability, Policy Accountability, Financial Accountability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI.....	iv
BIODATA PENULIS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	18
2.2 Akuntabilitas BUMDes	19
2.3 Penelitian Terdahulu	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Seting (Lokasi) Penelitian.....	26
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Unit Analisis	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Keabsahan Data	32
3.7 Analisis Data Penelitian	33
BAB IV SELAYANG PANDANG DESA RENDENG	35
4.1 Gambaran Umum Seting Penelitian	35
4.2 Demografi Penduduk Desa Rendeng	35
4.3 Menggali Potensi Desa Rendeng	36
4.3.1 Sejarah Terbentuknya Pelatihan Mewarnai Gerabah	37
4.3.2 Sejarah Terbentuknya Wisata Edukasi Gerabah (WEG)	39
4.4 Sejarah Pendirian BUMDes Karya Mulya	42
4.4.1 Struktur Organisasi BUMDes	45
4.4.2 Visi, Misi, dan Maksud Pendirian BUMDes	46
BAB V TAHAPAN DALAM BUMDES KARYA MULYA.....	48
5.1 Proses Pendirian.....	48
5.1.1 Tujuan Pendirian BUMDes Karya Mulya	49
5.1.2 Modal Pendirian BUMDes Karya Mulya	54
5.1.2.1 Dana Desa	54
5.1.2.2 Dana CSR	56
5.1.2.3 Dana BNPB	57
5.2 Tahap Pelaksanaan	60

5.2.1 Ketidaksesuaian Antara Jabatan Dengan Tugas Dalam Struktur Organisasi BUMDes Karya Mulya	61
5.2.1.1 Realita Rangkap Jabatan Ketua BUMDes	61
5.2.1.2 Bendahara BUMDes Sebagai Pendesain Gerabah.....	63
5.2.2 Pengelolaan BUMDes Karya Mulya	65
5.3 Tahap Pertanggungjawaban	68
5.4 Tahap Pengawasan	71
BAB VI AKUNTABILITAS PADA BUMDES KARYA MULYA.....	73
6.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.....	73
6.2 Akuntabilitas Manajerial	74
6.3 Akuntabilitas Program	75
6.4 Akuntabilitas Kebijakan	78
6.5 Akuntabilitas Finansial	80
BAB VII PENUTUP	81
7.1 Simpulan.....	81
7.2 Keterbatasan.....	82
7.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Informan Penelitian	27
Tabel 5.1 Realisasi Penggunaan Dana CSR	56
Tabel 5.2 Rincian Bantuan Dari BNPB.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Karya Mulya.....	46
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Lapangan (Transkrip Wawancara)	86
Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Desa Rendeng	99
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Musdes Pembentukan BUMDes	103
Lampiran 4 Dokumentasi	105